

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tertuang pada undang-undang tentang sistem pendidikan nomor 20 tahun 2003 yang dimaksud dengan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara'. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan itu harus disadari arti pentingnya, dan direncanakan secara sistematis, agar suasana pembelajaran berjalan secara optimal, dengan terbentuknya sebuah suasana dan proses pembelajaran tersebut, peserta didik, akan aktif mengembangkan potensi sesuai dengan bakat dan minat, dengan berkembangnya potensi peserta didik maka akan menghasilkan sebuah kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan oleh peserta didik untuk masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan melalui Jalur dan jenjang dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Terdapat tiga jalur pendidikan yaitu, jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal adalah pendidikan di luar pendidikan formal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selanjutnya Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang standar nasional pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan pasal 2 bahwa Standar Pendidikan Nasional SMK/MAK terdiri atas :

- (a) standar kompetensi lulusan;
- (b) standar isi;
- (c) standar proses pembelajaran;
- (d) standar penilaian pendidikan;
- (e) standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- (f) standar sarana dan prasarana;
- (g) standar pengelolaan;
- (h) standar biaya operasi;

Pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 47 tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada pendidikan Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah, pada pasal 2 bahwa Standar Pengelolaan Pendidikan digunakan sebagai pedoman bagi Satuan pendidikan dalam mengelola potensi dan sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal. Pada pasal berikutnya yaitu pada pasal 3 bahwa standar pengelolaan pendidikan meliputi :

- (a) perencanaan kegiatan pendidikan;
- (b) pelaksanaan kegiatan pendidikan; dan
- (c) pengawasan kegiatan pendidikan;

Kegiatan Perencanaan Kegiatan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar Peserta Didik secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri Satuan Pendidikan, perencanaan kegiatan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja satuan pendidikan terdiri dari :

- (a) rencana kerja jangka pendek dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
 - (b) rencana kerja jangka menengah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun
- sedangkan perencanaan kegiatan pendidikan memuat bidang :

- (a) kurikulum dan pembelajaran;
- (b) tenaga kependidikan;
- (c) sarana dan prasarana; dan
- (d) penganggaran;

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang ditetapkan dalam sebuah rencana anggaran belanja sekolah (RAPBS) menjadi salah satu acuan dalam menjalankan pelaksanaan operasional kegiatan baik dalam jangka pendek maupun

jangka menengah untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar dalam meningkatkan kompetensi Peserta Didik dengan terampil dalam bidang masing-masing, sehingga mencapai suatu tujuan pendidikan sekolah menengah kejuruan yang berkontribusi untuk dunia kerja saat ini.

Anggaran Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai ciri khas dengan sekolah menengah lainnya di antaranya kegiatan praktik kerja lapangan, pelaksanaan sertifikasi kompetensi keahlian, penyelarasan satuan pendidikan Vokasi dengan dunia kerja/industri/usaha, dan keterserapan lulusan pada industri dunia kerja serta kesesuaian antara kompetensi keahlian dengan pekerjaan di dunia kerja. Anggaran sekolah yang disusun secara tepat akan menghasilkan sebuah manajemen yang efektif dalam pelaksanaan anggaran pembiayaan sekolah menengah Kejuruan Swasta (SMKS), keterbatasan sumber dana yang bersumber dari partisipasi orang tua menjadikan sekolah menengah kejuruan swasta memprioritas pelaksanaan anggaran pembiayaan untuk terlaksananya kegiatan program sekolah. Selain itu Sekolah menengah kejuruan swasta mendapatkan dukungan dari pemerintah yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Sekolah Pencetak Wirausaha, bantuan Sertifikasi Siswa untuk kelas akhir, yang membutuhkan sebuah dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disandingkan dengan pembiayaan dari orang tua.

Dalam mengalokasikan anggaran pembiayaan, pihak SMKS perlu melakukan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kepentingan sekolah. Proses pengambilan keputusan untuk menentukan prioritas pelaksanaan anggaran pembiayaan di SMKS masih belum optimal. Seringkali keputusan diambil berdasarkan pertimbangan pengalaman pihak manajemen sekolah, tanpa mempertimbangkan berbagai kriteria yang lebih komprehensif, belum ada metode atau kriteria yang terstruktur dan objektif untuk menentukan prioritas alokasi anggaran. Akibatnya, sering kali terjadi ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dengan kebutuhan yang paling prioritas di sekolah.

Hal ini dapat menyebabkan alokasi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan yang paling prioritas, sehingga berdampak pada kualitas layanan pendidikan yang diberikan oleh SMKS. Misalnya, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pengembangan mutu profesi guru dan tenaga kependidikan justru digunakan untuk membiayai kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang kurang prioritas. Akibatnya, kondisi kualitas belajar mengajar kurang relevan dengan tuntutan masa kini, yang pada akhirnya mutu lulusan kurang terampil. Selain berdampak pada kegiatan proses belajar mengajar berdampak kepada rapor pendidikan dan satuan pendidikan (khusus Dasmen) yang tidak memiliki peningkatan dari nilai Rapor Pendidikan tidak akan

berkesempatan mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja (<https://pusatinformasi.raporpendidikan.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/18450907783193>) Capaian Rapor Pendidikan SMKS Kota Bogor menunjukkan bahwa masih rendah dalam indikator capaian proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu. Hasil capaian rapor pendidikan yang diambil dari simantap provinsi Jawa barat pada tanggal 23 Juni 2024, berikut table 1.1. Hasil capaian rapor Pendidikan.

Tabel 1. 1 Hasil Capaian Rapor Pendidikan SMKS Kota Bogor

No.	CAPAIAN	HASIL CAPAIAN			
		Baik	Sedang	Kurang	Capaian Tidak Tersedia
A.1	Kemampuan Literasi	26%	33%	35%	7%
A.2	Kemampuan Numerasi	7%	43%	43%	7%
A.3	Karakter	81%	11%	1%	7%
A.4	Penyerapan Lulusan SMK	28%	2%	2%	68%
A.5	Pendapatan Lulusan SMK	12%	14%	5%	68%
A.6	Kompetensi Lulusan SMK	38%	27%	23%	12%
C.3	Pengalaman Pelatihan PTK	1%	5%	93%	1%
D.1	Kualitas Pembelajaran	13%	65%	14%	7%
D.10	Iklm Inklusivitas	64%	29%	0%	7%
D.17	Link And Match Dengan Dunia Kerja	38%	36%	19%	7%
D.2	Refleksi Dan Perbaikan Pembelajaran Oleh Guru	38%	27%	23%	12%
D.3	Kepemimpinan Instruksional	56%	18%	13%	12%
D.4	Iklm Keamanan Sekolah	89%	4%	0%	7%
D.6	Iklm Kesetaraan Gender	30%	48%	15%	7%
D.8	Iklm Kebinekaan	72%	18%	2%	7%
E.1	Partisipasi Warga Sekolah	38%	36%	19%	7%
E.2	Proporsi Pemanfaatan Sumber Daya Sekolah Untuk Peningkatan Mutu	0%	10%	90%	0%
E.3	Pemanfaatan Tik Untuk Pengelolaan Anggaran	18%	69%	12%	0%

(sumber : sync.disdik.jabarprov.go.id/)

Berdasarkan tabel 1.1 dipengaruhi oleh alokasi anggaran di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS), seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.2. komponen anggaran pembiayaan yang diambil dari salah satu manajemen sekolah, selama 3 tahun terakhir.

Tabel 1. 2 Komponen Anggaran Pembiayaan

No.	Komponen	Prosentase Anggaran
1	Penerimaan Peserta Didik baru	2,0%
2	Pengembangan perpustakaan	18,2%
3	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	5,4%
4	Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran	4,8%
5	Administrasi kegiatan sekolah	7,3%
6	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan	0,7%
7	Langganan daya dan jasa	4,2%
8	Pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah	25,6%
9	Penyediaan alat multi media pembelajaran	3,0%
10	Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan ke bekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama	1,0%
11	Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB	2,3%
12	Pembayaran honor	25,4%

(sumber : admin BOSP SMKS 1 Dasa Semesta)

Berdasarkan tabel 1.2. terlihat bahwa alokasi anggaran pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan masih relatif rendah hanya 0,7% dari total anggaran sementara itu alokasi pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah paling tertinggi 25,6%, sehingga berdampak kepada rapor pendidikan mutu sekolah pada indikator proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu masih kurang, bahkan kategori baik 0,0% sebagaimana terdapat pada tabel 1.2.

Berdasarkan permendikbud ristek No 09 tahun 2022 tentang evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah terhadap PAUD DASMEN pasal 26 bahwa hasil evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai bahan untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan perencanaan program dalam rangka peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya selanjutnya pada pasal 28 bahwa hasil evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimanfaatkan oleh Satuan Pendidikan untuk :

- (a) mengidentifikasi masalah pendidikan yang perlu mendapatkan prioritas berdasarkan indikator dalam profil Satuan Pendidikan atau profil program pendidikan kesetaraan;

- (b) mendalami hasil identifikasi masalah pendidikan untuk menemukan akar masalah dan merumuskan langkah perbaikan; dan
melakukan perencanaan program untuk mengatasi akar masalah.

Penentuan pelaksanaan anggaran pembiayaan seharusnya dilakukan dengan perencanaan berbasis data (PBD) berikut adalah tahapan-tahapan perencanaan berbasis data :

1. Identifikasi Profil Satuan Pendidikan

Mengumpulkan data kondisi sekolah saat ini dengan mengacu kepada tahun sebelumnya, proses ini merupakan bagian dari evaluasi sistem pendidikan yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 09 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Dengan adanya evaluasi sistem pendidikan, Satuan Pendidikan dapat mengetahui apa saja hal yang sudah berjalan dengan baik maupun yang masih perlu penguatan dalam upaya perbaikan layanan yang berkelanjutan,

2. Merefleksikan dengan menetapkan perbaikan prioritas layanan satuan pendidikan

Untuk dapat merefleksikan penetapan prioritas perbaikan layanan adalah dengan menganalisa indikator-indikator mana yang harus diprioritaskan yang berdampak paling besar terhadap peserta didik, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, harus memfokuskan kepada sasaran perubahan, dengan indikator prioritas yang belum baik dengan membutuhkan perubahan segera, serta yang sesuai dengan visi misi satuan pendidikan.

3. Benahi upaya perbaikan layanan pendidikan

Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang mencerminkan area yang sudah ditetapkan, perencanaan perlu terjadi ditiga aspek yaitu

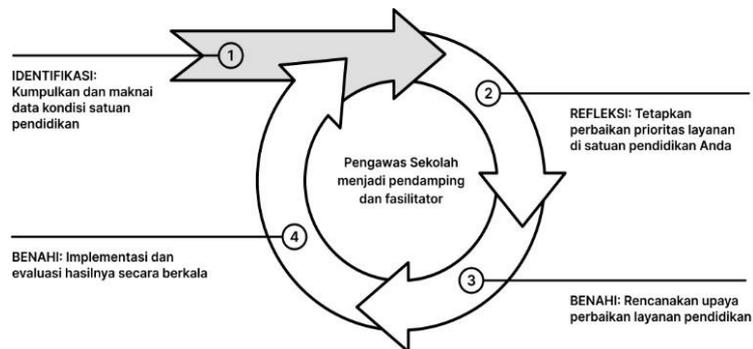
(a) pembelajaran,

(b) pengembangan profesi PTK (Pendidik dan kependidikan), dan

(c) pengelolaan sumber daya.

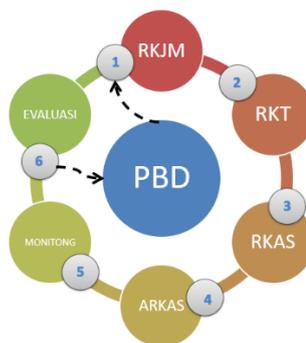
4. Implementasi dan evaluasi hasilnya secara berkala,

Setelah menyepakati rencana untuk perbaikan layanan pendidikan maka tahapan selanjutnya mengimplementasikan rencana yang sudah disusun, penyesuaian rencana mungkin akan terjadi akibat Jumlah/karakteristik peserta didik baru, Anggaran yang dimiliki, Proses belajar PTK, berikut adalah gambar 1.1 proses perencanaan anggaran.



Gambar 1. 1 Proses Perencanaan Anggaran
(Sumber : pusdatin.kemdikbud.go.id)

Hasil dari identifikasi, refleksi dan benahi dimasukan kedalam dokumen penganggaran (RKAS) untuk selanjutnya di monitor dan dievaluasi, seperti pada gambar 1.2 alur penyusunan anggaran pembiayaan :



Gambar 1. 2 Alur Penyusunan Anggaran Pembiayaan

Penentuan prioritas pernah dilakukan oleh Amelia putri dan Muhammad Nur Ikhsanto dalam penelitiannya penerapan metode topsis untuk penentuan prioritas perencanaan program sekolah (Saputri & Ikhsanto, 2023) bahwa metode tersebut dapat digunakan untuk menetapkan prioritas perencanaan program sekolah berdasarkan kriteria penilaian yang ada pada penelitian ini didapatkan hasil penentuan prioritas perencanaan program sekolah terbaik. Penelitian lainnya dilakukan oleh (Azahari, Pahrudin, & Yunita, 2022) dalam penelitian Penerapan Metode Topsis Pada Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah bahwa sistem pendukung keputusan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada proses penyeleksian siswa/l penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS). Penelitian lainnya yang juga dilakukan oleh (Efendy, Rahimullaily, & Nur`aini, 2023) pada Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Metode TOPSIS Berbasis Aplikasi (Studi kasus Keluarga Miskin di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan) bahwa sistem pendukung keputusan

ini membantu pendamping PKH mengoptimalkan bantuan dari Pemerintah tepat sasaran pada keluarga miskin. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Fahriandy & Bahar, 2022) pada Penerapan Algoritma TOPSIS Dalam Penentuan Prioritas Calon Agen Perubahan Pada Kantor Pengadilan bahwa Jika dibandingkan dengan model penentuan skala prioritas berbasis kriteria tidak terbobot, penentuan skala prioritas berbasis kriteria terbobot dengan menggunakan algoritma TOPSIS terbukti dapat meningkatkan akurasi dalam proses penentuan prioritas pemilihan agen perubahan pada instansi Pengadilan Negeri. Konsep ini juga sejalan dengan (dapat mendukung) kebijakan manajemen organisasi, yaitu Manual Mutu yang mengatur penggunaan sistem kriteria terbobot dalam menilai prioritas penentuan Agen Perubahan.

Topsis merupakan salah satu metode penunjang keputusan banyak kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang (Rahim, et al., 2018). TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang dipilih harus memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif dan memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif dari titik geometris menggunakan jarak euclidean untuk menentukan kedekatan relatif antara alternatif ke solusi yang optimal (Ding, Liang, Yang, & Wu, 2016). Pihak Sekolah dapat mengevaluasi setiap alternatif program atau kegiatan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, seperti Kesesuaian dengan visi misi sekolah, Bersifat mendesak/segera, Efektifitas biaya, Kepatuhan terhadap regulasi, pemenuhan standar nasional pendidikan, Keberlanjutan program, Kapasitas pelaksanaan, Relevansi dengan dunia industri, Akuntabilitas. Hasil evaluasi ini kemudian dapat digunakan untuk menentukan urutan prioritas yang tepat untuk pelaksanaan anggaran pembiayaan.

Penerapan metode TOPSIS untuk rekomendasi prioritas pelaksanaan anggaran pembiayaan SMKS diharapkan dapat memberikan solusi yang objektif dan terukur, sehingga membantu pihak sekolah dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara tepat dan efektif. Dengan demikian, kualitas pendidikan di SMKS dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap proses penganggaran.

Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menerapkan metode TOPSIS dalam menentukan prioritas pelaksanaan anggaran pembiayaan di SMKS. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengelolaan anggaran pendidikan di SMKS.

B. Permasalahan

Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) yang dikenal dengan komitmennya untuk mencetak lulusan yang siap kerja. Namun, di balik semangat tersebut, sekolah ini menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan anggaran yang berdampak pada kualitas pendidikan yang diberikan.

Setiap tahun, manajemen sekolah harus menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk memastikan semua program pendidikan dapat berjalan dengan baik. Namun, proses perencanaan ini sering kali dilakukan secara terburu-buru dan tanpa analisis yang mendalam. Keputusan mengenai alokasi anggaran sering kali diambil berdasarkan pengalaman masa lalu, bukan berdasarkan data dan informasi yang akurat. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara tujuan pendidikan yang ingin dicapai dengan alokasi anggaran yang tersedia.

Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya akan pentingnya perencanaan berbasis data. Manajemen sekolah, meskipun berpengalaman, sering kali tidak menggunakan data untuk menganalisis kebutuhan Pendidikan, tidak menyadari bahwa dengan menggunakan pendekatan berbasis data dan metode, bisa mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih. Akibatnya, program-program yang seharusnya mendapatkan dukungan dana yang cukup, seperti pengembangan kompetensi guru dan peningkatan kualitas kurikulum, sering kali terabaikan.

Di sisi lain, ketika manajemen mencoba untuk menentukan prioritas pelaksanaan anggaran, mereka merasa kesulitan. Kriteria yang digunakan untuk menentukan prioritas sering kali tidak lengkap atau tidak relevan dengan kebutuhan sekolah. Tanpa adanya metode penilaian yang sistematis, seperti metode TOPSIS, mereka terjebak dalam proses pengambilan keputusan yang tidak terstruktur. Keputusan yang diambil menjadi subyektif dan tidak konsisten, sehingga mengurangi efektivitas pengelolaan anggaran.

Sementara itu, kondisi di lapangan menunjukkan dampak dari pengelolaan anggaran yang kurang optimal. Banyak siswa yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan pengalaman belajar yang memadai. Kualitas pendidikan menurun, dan lulusan tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk bersaing di dunia kerja. Data dari Rapor Pendidikan menunjukkan bahwa capaian kualitas pendidikan di SMKS ini masih rendah, terutama dalam indikator pemanfaatan sumber daya untuk peningkatan mutu. Hal ini menciptakan kekhawatiran di kalangan orang tua dan masyarakat, yang mulai meragukan kemampuan sekolah dalam mencetak lulusan yang berkualitas.

Keterbatasan sumber dana juga menjadi masalah yang signifikan. Sebagian besar anggaran sekolah berasal dari partisipasi orang tua dan dukungan pemerintah. Namun, dana yang terbatas ini sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan sekolah. Akibatnya, manajemen harus lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran, tetapi tanpa pendekatan yang tepat, prioritas yang diambil sering kali tidak mencerminkan kebutuhan yang paling mendesak.

Di tengah tantangan ini, manajemen sekolah perlu melakukan perubahan. mencari solusi yang dapat membantu dalam menentukan prioritas pelaksanaan anggaran dengan lebih baik. Dengan harapan ingin menerapkan metode TOPSIS untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan yang lebih objektif dan terukur. Dengan demikian, berharap dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memenuhi kebutuhan siswa dengan lebih baik.

Namun, perjalanan menuju perubahan tidaklah mudah. Manajemen harus mengatasi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman tentang metode analisis, tantangan dalam pengumpulan data, metode yang diterapkan dan perlunya integrasi informasi dari berbagai sumber. Meskipun demikian, berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan agar SMKS ini dapat kembali menjadi tempat yang menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja.

Pelaksanaan pembiayaan anggaran satuan Pendidikan yang tertuang pada Kertas Kerja Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), disusun oleh bendahara, kepala sekolah bersama komite sekolah berdasarkan kebutuhan sekolah yang akan datang selama 12 bulan tahun anggaran, dan kemudian di ajukan pengesahan anggaran melalui aplikasi ARKAS, berikut adalah rekapitulasi format K7 rekapitulasi penggunaan anggaran tahun 2024 pada tabel 1.3 dibawah ini :

Tabel 1. 3 Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran

No.	Komponen	KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)		REALISASI KERTAS KERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)	
		Jumlah (Rp)	Jumlah (%)	Jumlah (Rp)	Jumlah (%)
1	Penerimaan Peserta Didik baru	16.986.000	1,20%	1.030.000	0,07%
2	Pengembangan perpustakaan	167.256.000	11,85%	163.620.000	11,59%
3	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	7.150.000	0,51%	46.605.000	3,30%
4	Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran	63.190.000	4,48%	22.610.000	1,60%

No.	Komponen	KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)		REALISASI KERTAS KERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)	
		Jumlah (Rp)	Jumlah (%)	Jumlah (Rp)	Jumlah (%)
5	Administrasi kegiatan sekolah	141.328.000	10,01%	123.577.500	8,75%
6	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan	988.000	0,07%	-	0,00%
7	Langganan daya dan jasa	68.217.700	4,83%	63.905.500	4,53%
8	Pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah	348.224.000	24,67%	448.449.500	31,76%
9	Penyediaan alat multi media pembelajaran	165.500.000	11,72%	191.500.000	13,56%
10	Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan ke bekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama	24.535.200	1,74%	2.410.000	0,17%
11	Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB	21.117.100	1,50%	13.800.500	0,98%
12	Pembayaran honor	387.308.000	27,43%	334.292.000	23,68%
Total		1.411.800.000	100,00%	1.411.800.000	100,00%

(sumber admin BOSP SMKS 1 Dasa Semesta)

Berdasarkan tabel 1.3 diatas perencanaan anggaran yang disusun sebelum cut off pengesahan penyaluran anggaran dana yang di anggarkan terdapat perbedaan yang signifikan dengan realisasi penggunaan anggaran di akhir tahun, Penerimaan Peserta Didik baru perencanaan adalah 1,20% dan realiasi anggran 0,07%, Pengembangan perpustakaan sebesar 11,85% dan realiasi 11,59%, Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler perencanaan sebesar 0,51% dan realiasi 3,30%, Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran perencanaan sebesar 4,48% dan realiasi 1,60%, Administrasi kegiatan sekolah perencanaan sebesar 10,01% dan realiaasi 8,75%,

Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan perencanaan sebesar 0,07% dan realisasi 0,00%, Langganan daya dan jasa perencanaan sebesar 4,83% dan realisasi 4,53%, Pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah perencanaan sebesar 24,67% dan realisasi 31,76%, Penyediaan alat multi media pembelajaran perencanaan sebesar 11,72% dan 13,56%, Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebeerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama perencanaan sebesar 1,74% dan realisasi 0,17%, Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB perencanaan sebesar 1,50% dan realisaasi 0,98%, Pembayaran honor perencanaan sebesar 27,43% dan realiasi 23,68%,

Ketidaktepatan perencanaan anggaran, menganalisis menggunakan beberapa kriteria :

- (a) Berdasarkan Besaran Selisih/Deviasi

Tabel 1. 4 Kriteria Deviasi Rencana dan realisasi

Kriteria	Komponen	Rencana	Realisasi	Selisih
Selisih Sangat Besar (>5%)	Pemeliharaan sarana dan prasarana	24.67%	31.76%	+7.09%
Selisih Besar (2-5%)	Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran	4.48%	1.60%	-2.88%
	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	0.51%	3.30%	+2.79%
Selisih Menengah (1-2%):	Penyelenggaraan bursa kerja khusus	0.51%	3.30%	-1.57%
	Penerimaan Peserta Didik baru	1.20%	0.07%	-1.13%

- (b) Berdasarkan Dampak terhadap Proses Pendidikan

- a) Dampak Langsung pada Pembelajaran :

- 1) Pengembangan profesi guru: 0% realisasi (sangat kritis)
- 2) Kegiatan pembelajaran : deviasi signifikan
- 3) Kegiatan asesmen : realisasi jauh di bawah rencana

- b) Dampak pada Operasional:

- 1) Pemeliharaan sarana : realisasi jauh melebihi rencana

2) Administrasi kegiatan : perbedaan cukup signifikan

(c) Berdasarkan Sifat Penyimpangan

(1) Program Tidak Terealisasi :

- (a) Pengembangan profesi guru (0% realisasi)
- (b) Bursa kerja khusus (hampir tidak terealisasi)

(2) Realisasi Jauh di Atas Rencana :

- (a) Pemeliharaan sarana dan prasarana
- (b) Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler

(3) Realisasi Jauh di Bawah Rencana :

- (a) Kegiatan asesmen
- (b) Penerimaan peserta didik baru

Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran untuk menunjukkan perbandingan antara perencanaan dan realisasi yang menunjukkan 5 Komponen dengan Perbedaan Signifikan antara Perencanaan dan Realisasi Anggaran ketidaktepatan seperti pada tabel 1.5 dibawah ini :

Tabel 1. 5 perbedaan rencana dan realisasi

Komponen	Rencana (%)	Realisasi (%)	Selisih (%)
Penerimaan Peserta Didik baru	1.20	0.07	-1.13
Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan	0.07	0.00	-0.07
Penyelenggaraan bursa kerja khusus dan praktik kerja industri	1.74	0.17	-1.57
Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran	4.48	1.60	-2.88
Pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah	24.67	31.76	+7.09

Berdasarkan tabel 1.5, beberapa perbedaan signifikan yang menunjukkan ketidaktepatan perencanaan anggaran :

- (a) Pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah, Terjadi kelebihan realisasi sebesar 7.09% dari yang direncanakan
- (b) Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran, Realisasi lebih rendah 2.88% dari perencanaan

- (c) Penyelenggaraan bursa kerja khusus dan praktik kerja industri, Realisasi jauh lebih rendah, dengan selisih -1.57%
- (d) Penerimaan Peserta Didik baru, Realisasi sangat rendah dengan selisih - 1.13%
- (e) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan: Tidak terealisasi sama sekali (0%)

Ketidaktepatan ini bisa berdampak pada :

- (a) Perlu melakukan pengajuan perubahan anggaran ke Dinas Pendidikan
- (b) Risiko mendapat potongan penyaluran dana untuk tahun berikutnya
- (c) Mengganggu efektivitas program pendidikan
- (d) Mempengaruhi kualitas layanan pendidikan kepada siswa

Oleh karena itu perencanaan pelaksanaan kegiatan anggaran harus direncanakan secara matang dan tepat.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang telah di uraikan diatas, sehingga dapat menjadi point penting untuk di identifikasi pemasalah, yaitu sebagai berikut :

- (a) Pelaksanaan anggaran pembiayaan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta masih belum efektif
- (b) Penentuan Kriteria yang digunakan masih belum tepat

2. Rumusan Masalah

- (a) Pokok masalah (Problem Statement)

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, bahwa dalam menentukan pelaksanaan anggaran pembiayaan sekolah SMK masih belum tepat dan efektif

- (b) Pertanyaan penelitian (Research Question)

Berdasarkan pokok masalah, maka pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan adalah :

- (1) Bagaimana penerapan metode *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) untuk rekomendasi prioritas pelaksanaan anggaran pembiayaan di SMKS?
- (2) Seberapa tepat dan efektif penerapan metode *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) untuk rekomendasi prioritas pelaksanaan anggaran pembiayaan SMKS?

C. Maksud dan tujuan

Penelitian ini bermaksud untuk menerapkan metode *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas pelaksanaan anggaran pembiayaan di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS). Metode ini diharapkan dapat memberikan solusi yang objektif dan terukur dalam proses penentuan prioritas, sehingga dapat membantu pihak sekolah dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara tepat dan efektif dengan tujuan :

- (a) Mendapatkan alternatif-alternatif anggaran pembiayaan yang optimal, sehingga pihak sekolah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan sesuai prioritas
- (b) Mendapatkan proses penentuan prioritas anggaran yang lebih cepat, mudah, dan efisien, sehingga pihak sekolah dapat membuat keputusan yang lebih baik dan efektif dalam mengalokasikan anggaran
- (c) Mengembangkan prototipe aplikasi sistem pendukung keputusan dengan metode topsis untuk rekomendasi prioritas pelaksanaan anggaran pembiayaan SMK
- (d) Mengukur ketepatan dan efektivitas metode topsis dalam memberikan rekomendasi prioritas pelaksanaan anggaran pembiayaan SMKS

Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam proses penganggaran di SMKS, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

D. Spesifikasi Hasil

Spesifikasi hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut :

- (a) Sistem pendukung keputusan rekomendasi prioritas pelaksanaan anggaran pembiayaan SMKS yang lebih efektif
- (b) Aplikasi berbasis web yang dapat diakses secara daring oleh pihak manajemen SMKS untuk prioritas pelaksanaan anggaran biaya Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) yang memiliki antarmuka yang user friendly
- (c) Sistem pendukung keputusan menggunakan metode TOPSIS (*Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution*) untuk melakukan perengkingan alternatif untuk memberikan rekomendasi prioritas pelaksanaan anggaran pembiayaan SMKS.
- (d) Memiliki fitur input, fitur pengurutan dan fitur ekspor import alternatif yang dapat membantu proses penentuan prioritas anggaran pembiayaan menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi

E. Signifikansi Penelitian & Pengembangan

Pentingnya penelitian ini dilakukan dalam rangka mengembangkan penerapan metode TOPSIS untuk penentuan prioritas pelaksanaan anggaran pembiayaan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Sementara manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- (a) Sumbangan pengetahuan dalam penerapan metode TOPSIS untuk penentuan prioritas pelaksanaan anggaran pembiayaan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS)
- (b) Memudahkan pihak sekolah dalam hal penentuan prioritas pelaksanaan anggaran pembiayaan di SMKs.
- (c) Dapat dijadikan sebagai acuan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan penetapan pelaksanaan anggaran pembiayaan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS)

F. Asumsi dan Keterbatasan

Berikut adalah asumsi dan keterbatasan pada penelitian yang dilakukan :

1. Asumsi

Asumsi dalam penelitian, antara lain :

- (a) Penelitian ini data yang digunakan untuk analisis pengelolaan anggaran di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) adalah akurat, lengkap, dan dapat diandalkan. Data ini mencakup informasi Perencanaan keuangan, alokasi anggaran, dan realisasi penggunaan anggaran
- (b) Kriteria yang digunakan dalam analisis TOPSIS akan tetap konsisten selama periode penelitian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil analisis dapat dibandingkan dan diinterpretasikan dengan benar.
- (c) Metode TOPSIS adalah pendekatan yang tepat untuk mengevaluasi alternatif pengelolaan anggaran di SMKs dan dapat memberikan hasil yang valid dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan.
- (d) Tidak ada perubahan signifikan dalam kebijakan pendidikan atau kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi pengelolaan anggaran di SMKs selama periode penelitian

2. Keterbatasan :

Dalam penelitian ini, pengembangan aplikasi yang dikembangkan memiliki keterbatasan, antara lain :

- (a) Keterbatasan utama adalah ketidakmampuan TOPSIS untuk menangkap hubungan sebab-akibat atau dampak jangka panjang dari pengelolaan anggaran terhadap hasil pendidikan.
- (b) Aplikasi saat ini belum memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan data eksternal secara real-time, seperti data keuangan dari sumber sumber komite yang dapat memberikan konteks tambahan untuk analisis
- (c) Penentuan kriteria evaluasi dapat mempunyai unsur subjektif dan dapat berbeda-beda sesuai dengan karakteristik sekolah menengah kejuruan swasta (SMKS)

G. Definisi Istilah dan Definisi Operasional

Adapun definisi istilah-istilah yang terdapat pada penelitian ini dapat di definisikan sebagai berikut :

- (a) Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) adalah sekolah pada jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pihak swasta (non-pemerintah) dan memberikan program-program pendidikan kejuruan.
- (b) Anggaran adalah rencana keuangan tahunan yang disusun dan dikelola oleh pihak SMKS, yang mencakup perkiraan pendapatan dan belanja sekolah untuk menjalankan kegiatan operasional dan pengembangan sekolah selama satu periode anggaran.
- (c) Pembiayaan adalah segala bentuk pendanaan yang digunakan untuk menunjang seluruh kegiatan operasional dan pengembangan sekolah
- (d) Kriteria Penilaian Anggaran adalah parameter spesifik yang digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan alternatif pengelolaan anggaran dalam SMKS, yang mungkin mencakup aspek-aspek seperti efisiensi penggunaan dana, dampak pendidikan, dan keberlanjutan finansial.
- (e) Alternatif Pengelolaan Anggaran adalah opsi yang diusulkan untuk pengelolaan anggaran di SMKS, seperti pengalokasian dana untuk pelatihan guru, pengadaan fasilitas pendidikan, dan program pengembangan siswa.
- (f) Model Penilaian TOPSIS SMKS adalah Adaptasi metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) yang disesuaikan untuk konteks pengelolaan anggaran di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta, termasuk kriteria dan bobot yang relevan.